

Transformasi Pendidikan Politik dalam Membentuk *Nation Building* Bagi Siswa di SMA Negeri 7 Gorontalo

Udin Hamim^{1*}, Intan Tiara Kartika², Yayan Sahi³, ABD Latif Kamaru⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo

E-mail: udin.hamim@ung.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3333>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31 Oct 2025

Revised: 06 Nov 2025

Accepted: 18 Nov 2025

Kata Kunci:

Kesadaran Politik,
Kewarganegaraan
Multikultural,
Siswa SMA 5 Gorontalo

Keywords:

*Inflation, Rupiah
Exchange Rate, Stock
Market Performance,
Financial Performance,
Publicly Listed Banking.*



ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman politik dan memperkuat *nation building* melalui partisipasi edukatif siswa di SMAN 7 Gorontalo. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari fenomena rendahnya kesadaran politik di kalangan pelajar yang berdampak pada lemahnya semangat kebangsaan dan partisipasi warga negara muda dalam kehidupan demokratis. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk menghadirkan pembelajaran politik yang kontekstual, reflektif, dan partisipatif agar siswa mampu memahami hubungan antara pengetahuan politik dengan tanggung jawab kebangsaan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *participatory education* yang melibatkan siswa secara aktif melalui observasi, sosialisasi, diskusi kelompok, dan refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa. Data diperoleh melalui survei menggunakan angket yang dianalisis secara deskriptif kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk grafik untuk menggambarkan persepsi dan tingkat pemahaman siswa terhadap politik dan *nation building*. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada pada kategori “Setuju” dan “Sangat Setuju” terhadap pentingnya pemahaman politik dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan diskusi dan refleksi menunjukkan bahwa partisipasi edukatif mampu menjadi sarana efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran bernegara.

This community service activity aims to increase political understanding and strengthen nation building through the educational participation of students at SMAN 7 Gorontalo. The background of this activity departs from the phenomenon of low political awareness among students which has an impact on the weak spirit of nationality and the participation of young citizens in democratic life. Therefore, this activity is designed to present contextual, reflective, and participatory political learning so that students are able to understand the relationship between political knowledge and national responsibility. The implementation method uses a participatory education approach that actively involves students through observation, socialization, group discussions, and reflection on Pancasila values in the context of national life. Data was obtained through a survey using a questionnaire that was analyzed in a quantitative descriptive manner, then presented in the form of a graph to illustrate students' perception and level of understanding of politics and nation building. The results of the service showed that most of the students were in the category of "Agree" and "Strongly Agree" on the importance of political understanding in forming national consciousness. The active involvement of students in discussion and reflection activities shows that educational participation can be an effective means in fostering a sense of social responsibility and state awareness.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Udin Hamim, et al (2025). Transformasi Pendidikan Politik dalam Membentuk *Nation Building* Bagi Siswa di SMA Negeri 7 Gorontalo, 4(2) 10140-10152. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3333>

PENDAHULUAN

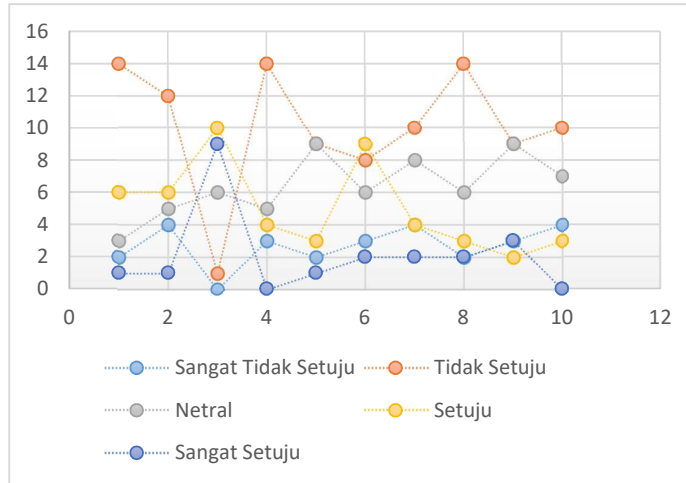
Istilah transformasi pendidikan politik dan *nation building* merepresentasikan dua gagasan yang memiliki kedalaman makna sekaligus keterkaitan fungsional dalam pembentukan karakter dan identitas kebangsaan. Keduanya menuntut penafsiran yang cermat agar dapat ditemukan titik integrasi yang bermakna, terutama karena tema semacam ini masih jarang disentuh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, transformasi dimaknai sebagai proses perubahan mendasar menuju arah yang lebih baik; pendidikan politik merujuk pada upaya sistematis untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa; sedangkan *nation building* berorientasi pada pembentukan dan penguatan identitas, persatuan, serta karakter bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Dalam konteks perubahan sosial, transformasi mencerminkan pergeseran yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, baik dalam pola pikir maupun tindakan individu dan institusi (Vial, 2021). Di dunia pendidikan, perubahan ini bukan sekadar teknis atau struktural, tetapi juga reflektif yakni proses memahami kembali pengetahuan dan nilai-nilai yang telah ada agar selaras dengan tantangan zaman (Ashworth, 2004). Transformasi yang sejati menuntut pendekatan yang integratif dan berkesinambungan, sehingga hasilnya tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan menembus dimensi sosial dan kelembagaan (Bentz, O'Brien, & Scoville-Simonds, 2022). Intinya terletak pada pembaruan paradigma yang memungkinkan individu dan masyarakat beradaptasi secara kritis terhadap perubahan.

Pendidikan politik berperan strategis dalam memperkuat proses tersebut karena berfungsi menumbuhkan *political knowledge*, *political engagement*, dan *civic awareness* sebagai landasan bagi partisipasi publik yang bermakna. Warga negara tanpa bekal pengetahuan politik yang memadai akan sulit memahami dinamika kebijakan dan proses demokrasi (Galston, 2001). Lebih jauh, pendidikan politik yang berorientasi pada perubahan sosial menumbuhkan kesadaran sosiopolitik, yakni kemampuan melihat keterkaitan antara dunia pendidikan dan realitas sosial-politik yang lebih luas (Picower, 2013). Upaya ini akan efektif apabila teori dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata, sehingga mampu meningkatkan kesadaran kritis serta mendorong keterlibatan sipil secara berkelanjutan (Yu & Wang, 2025). Dengan demikian, pendidikan politik menjadi sarana pembentukan warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya, serta memiliki kemampuan reflektif untuk menilai dan berkontribusi terhadap kehidupan publik. Sementara itu, *nation building* merupakan proses multidimensional yang mencakup pembentukan identitas nasional, penguatan solidaritas sosial, dan pengembangan kesadaran kolektif di antara warga negara. Proses ini menjadi landasan bagi penguatan legitimasi politik dan kohesi sosial dalam kehidupan berbangsa. Konsep ini menekankan pentingnya penyatuan berbagai kelompok etnis, budaya, dan sosial ke dalam satu kerangka identitas nasional yang kohesif (Mylonas, 2017). Dalam kajian komparatif, *nation building* sering kali berjalan seiring dengan *state building*, yakni pembentukan kapasitas kelembagaan negara yang efektif untuk menopang pembangunan nasional (Deutsch & Foltz, 2010).

Namun, dinamika pembentukan bangsa tidak selalu berjalan mulus. Terdapat ketegangan antara dorongan integrasi nasional dan kebutuhan mempertahankan identitas lokal atau etnis, yang berpotensi menimbulkan disintegrasi apabila tidak dikelola secara inklusif (Connor, 1972). Kajian kontemporer menunjukkan bahwa perbedaan antara *state building* dan *nation building* bukan hanya persoalan istilah, melainkan menggambarkan dua strategi yang berbeda dalam membangun tatanan sosial-politik yang stabil dan berkeadilan (Townley, 2005). Oleh karena itu, *nation building* dapat dipahami sebagai proyek jangka panjang yang menggabungkan dimensi politik, sosial, dan kultural guna memperkuat kesatuan bangsa yang berdaulat, berdaya saing, serta adaptif terhadap perubahan global. Titik temu antara transformasi pendidikan politik dan *nation building* terletak pada orientasi yang sama, yaitu membentuk warga negara yang melek politik serta sadar akan peran dan partisipasinya dalam ruang publik, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, ruang berpikir peserta didik diharapkan berkembang hingga mampu berpartisipasi secara langsung dalam diskusi politik, kampanye, dan kegiatan pemungutan suara (*voting*). Sementara itu, partisipasi tidak langsung tercermin dalam kemampuan mengekspresikan pandangan politik melalui lisan maupun tulisan. Hal ini selaras dengan konstruksi *nation building* yang hanya dapat tercapai apabila diimbangi oleh kesadaran politik dan keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menariknya, dalam observasi awal kegiatan pengabdian ditemukan adanya kesenjangan (*gap*) antara paradigma pendidikan politik dan *nation building* di SMAN 7 Gorontalo. Kesenjangan tersebut

terlihat dari perbedaan tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai politik kebangsaan di kalangan peserta didik, sebagaimana tergambar dalam temuan survei yang disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 1. Observasi Survey Pemahaman Politik dalam Membentuk Nation building bagi Siswa di SMAN 7 Gorontalo.

Sumber. Olahan data, (2025).

Grafik 1 memperlihatkan hasil observasi survei mengenai pemahaman politik siswa dalam kaitannya dengan pembentukan *nation building* di SMAN 7 Gorontalo. Grafik tersebut menampilkan lima kategori tanggapan, yaitu *Sangat Tidak Setuju*, *Tidak Setuju*, *Netral*, *Setuju*, dan *Sangat Setuju*. Pola sebaran data menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap pentingnya pemahaman politik dalam membangun kesadaran kebangsaan masih beragam.

Secara umum, kategori *Tidak Setuju* dan *Setuju* mendominasi tanggapan responden pada sebagian besar indikator, menandakan adanya perbedaan tingkat pemahaman politik di kalangan siswa. Beberapa butir pertanyaan memperlihatkan kecenderungan siswa yang belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara literasi politik dan pembentukan karakter kebangsaan, tercermin dari fluktuasi signifikan antara kategori *Netral* dan *Tidak Setuju*. Meskipun demikian, terdapat pula peningkatan pada kategori *Setuju* dan *Sangat Setuju* di beberapa item pertanyaan, yang menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran politik di kalangan siswa terhadap peran mereka dalam proses *nation building*. Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan bahwa pemahaman politik di lingkungan sekolah masih memerlukan penguatan melalui kegiatan pembelajaran dan pengalaman sosial yang lebih kontekstual. Dengan demikian, pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan diharapkan dapat menjadi sarana transformasi kesadaran siswa dalam memperkuat semangat kebangsaan dan identitas nasional di masa depan.

Ulasan survei terhadap 24 siswa SMAN 7 Gorontalo, ditemukan adanya kesenjangan konseptual dan praktis antara pemahaman pendidikan politik dan penerapannya dalam membentuk semangat *nation building*. Sebagian besar siswa masih memandang pendidikan politik sebatas pada aspek kognitif dan hafalan konsep demokrasi, bukan sebagai sarana pembentukan kesadaran kritis dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa. Hal ini terlihat dari temuan bahwa 14 siswa menyatakan tidak setuju jika pendidikan politik perlu dikaitkan dengan praktik nyata kehidupan berbangsa, dan hanya 7 siswa yang melihat pentingnya keterkaitan tersebut. Selain itu, sebanyak 16 siswa menilai pendidikan politik hanya penting bagi calon pemimpin, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik belum memahami pendidikan politik sebagai hak dan tanggung jawab seluruh warga negara. Kecenderungan lain yang muncul adalah pemahaman normatif tanpa refleksi kritis terhadap makna kebangsaan. Sebagian besar siswa, yakni 19 orang, menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mengikuti pelajaran PPKn secara otomatis dapat menumbuhkan kesadaran membangun persatuan bangsa. Pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik masih dimaknai secara formalistik dan belum menyentuh dimensi internalisasi nilai yang mendalam. Sementara itu, sebagian besar siswa menolak pandangan bahwa semangat kebangsaan dapat terbentuk hanya melalui kemajuan ekonomi, tetapi di sisi lain masih ada 13 siswa yang beranggapan bahwa perbedaan pendapat perlu dihindari demi menjaga persatuan bangsa. Hal ini

menandakan masih adanya paradigma konservatif yang menganggap kesatuan bangsa identik dengan keseragaman pandangan, bukan dialog demokratis.

Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa 11 siswa menganggap kritik terhadap kebijakan negara bisa melemahkan rasa cinta kepada bangsa. Pandangan ini memperlihatkan adanya keterbatasan pemahaman tentang makna partisipasi politik yang sehat dan konstruktif. Selain itu, sebagian besar siswa, yakni 16 orang, menilai bahwa kegiatan kepemimpinan di sekolah tidak berpengaruh besar terhadap pembentukan semangat kebangsaan, sementara 12 siswa beranggapan bahwa karakter nasionalis bisa terbentuk tanpa pemahaman politik. Fakta ini memperkuat indikasi bahwa pendidikan politik belum diintegrasikan secara substantif dalam kegiatan pembelajaran maupun non-pembelajaran di sekolah. Secara keseluruhan, hasil survei ini menggambarkan bahwa siswa SMAN 7 Gorontalo memiliki pengetahuan dasar tentang konsep kebangsaan, namun belum menunjukkan pemahaman reflektif dan partisipatif dalam konteks politik kewarganegaraan. Dengan demikian, kesenjangan utama yang ditemukan terletak pada tiga aspek: pertama, pendidikan politik yang masih bersifat kognitif dan belum mendorong partisipasi aktif; kedua, orientasi normatif yang belum berkembang menjadi pemikiran kritis; dan ketiga, kesadaran individualistik yang belum diarahkan pada kontribusi kolektif dalam membangun semangat *nation building*. Oleh karena itu, pengabdian ini difokuskan pada dua upaya utama, yaitu pengenalan pendidikan politik dalam membentuk *nation building* serta penguatan kesadaran dan partisipasi kebangsaan siswa SMAN 7 Gorontalo melalui kegiatan pembinaan yang reflektif dan aplikatif.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang menekankan kolaborasi antara tim dosen, mahasiswa, dan peserta didik. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMAN 7 Gorontalo dengan melibatkan 24 siswa sebagai peserta utama. Tim pelaksana terdiri atas tiga orang dosen dan dibantu oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan instrumen survei, dan penentuan materi pembinaan berdasarkan hasil identifikasi kesenjangan pemahaman siswa tentang pendidikan politik dan *nation building*. Kedua, tahap pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi berupa *diskusi reflektif*. Dalam sesi ini, peserta diperkenalkan pada konsep dasar pendidikan politik yang transformatif serta relevansinya terhadap pembangunan karakter kebangsaan. Selain itu, tim dosen dan mahasiswa juga memfasilitasi simulasi partisipasi politik sederhana, seperti *role play* musyawarah dan debat publik, untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan kemampuan berpendapat secara demokratis. Ketiga, tahap pendampingan dan evaluasi, di mana peserta diajak merefleksikan hasil kegiatan melalui sesi tanya jawab dan penyusunan kesimpulan bersama mengenai peran generasi muda dalam memperkuat semangat kebangsaan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan untuk melihat sejauh mana peningkatan kesadaran politik dan sikap kebangsaan terbentuk.

Ulasan penggunaan metode partisipasi edukatif dalam kegiatan pengabdian ini menekankan upayanya dalam menciptakan ruang interaksi yang kolaboratif antara dosen, mahasiswa, dan siswa, di mana setiap pihak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan partisipatif memperkuat dimensi pedagogis dengan melibatkan peserta didik secara langsung dalam merumuskan makna, pengalaman, serta solusi terhadap isu pendidikan politik dan *nation building*. Dengan demikian, proses pengabdian tidak hanya bersifat transfer pengetahuan satu arah, tetapi menjadi wadah *co-learning* yang menumbuhkan kesadaran kritis dan rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut (Cumbo & Selwyn, 2022). Selain itu, partisipasi edukatif juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan karena memberikan ruang bagi siswa untuk menyuarakan pandangan, mengasah kemampuan reflektif, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif. Melalui metode ini, kegiatan pengabdian dapat memperkuat keterlibatan emosional dan intelektual peserta, sekaligus meningkatkan relevansi hasil pembelajaran terhadap konteks kehidupan nyata mereka (Seale, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan Nilai-Nilai Politik dalam Membentuk Nation Building pada Siswa di SMA Negeri 7 Gorontalo.

Ulasan atas pengenalan nilai-nilai politik dalam membentuk *nation building* didasarkan pada beberapa kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa pengenalan nilai-nilai politik pada siswa sekolah menengah masih memerlukan pendekatan yang lebih integratif antara dimensi pendidikan, kesadaran kewarganegaraan, dan pembangunan karakter kebangsaan. Proses *nation building* sangat erat kaitannya dengan kerja sama politik dan keanggotaan warga negara dalam suatu bangsa, yang menjadi fondasi bagi terbentuknya kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap negara. Namun, pada tataran pendidikan menengah, dimensi ini sering kali belum terinternalisasi secara efektif dalam kurikulum maupun kegiatan pembelajaran (Deutsch, 2017). Hubungan antara *nation building*, identitas, dan pendidikan kewarganegaraan juga perlu dikaji secara lebih mendalam karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideologis pendidikan dan praktik nyata di sekolah. Pendidikan politik di tingkat sekolah belum sepenuhnya menjadi sarana pembentukan kesadaran kebangsaan yang reflektif dan kritis terhadap dinamika sosial-politik yang berkembang (Zajda, 2009). Demokratisasi berperan penting dalam memperkuat keterlibatan warga negara, terutama generasi muda, dalam proses pembentukan tatanan sosial baru yang berkeadaban. Namun, konteks pendidikan politik di sekolah sering kali masih bersifat normatif dan seremonial, belum menyentuh aspek praksis demokrasi yang menumbuhkan kemampuan partisipatif siswa (Bendix, 2017). Proses *nation building* juga memerlukan dukungan terhadap inklusi politik serta pembentukan relasi yang kuat antara negara dan warga negara. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti perlunya membangun ruang belajar yang menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap bangsa melalui pemahaman nilai-nilai politik yang aplikatif (Wimmer, 2015). Selain itu, pembentukan bangsa harus dilihat sebagai proses historis yang terus berjalan, dipengaruhi oleh interaksi sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Karena itu, memperkenalkan nilai-nilai politik sejak di bangku sekolah menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki kesadaran kebangsaan kuat, berpikir kritis, dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional (Deutsch & Foltz, 2010).

Dari berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengenalan nilai-nilai politik memiliki peran strategis dalam membentuk *nation building* melalui penguatan kesadaran kebangsaan dan partisipasi warga negara sejak usia sekolah. Pendidikan politik di tingkat menengah perlu diarahkan pada pembelajaran yang reflektif, kontekstual, dan partisipatif agar siswa mampu memahami relasi antara negara dan warganya secara kritis. Dengan demikian, transformasi pendidikan politik menjadi kunci dalam menumbuhkan karakter kebangsaan yang inklusif dan berkeadaban. Upaya ini sekaligus memperkuat fondasi *nation building* yang berkelanjutan. Menyikapi hal itu, ada keselarasan dengan pengenalan nilai-nilai politik sebagai fondasi *nation building* di SMA Negeri 7 Gorontalo. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya memahami politik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas urusan pemilu atau pemerintahan. Nilai-nilai politik seperti keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif dipandang sebagai prinsip penting yang mencerminkan identitas kebangsaan dan perlu dijunjung tinggi oleh generasi muda. Melalui proses pengenalan ini, siswa tidak hanya diajak memahami makna nilai-nilai politik, tetapi juga diharapkan mampu menginternalisasikannya dalam sikap dan tindakan nyata, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat.

Pendekatan yang digunakan meliputi pembelajaran interaktif di kelas, diskusi kelompok, simulasi sidang atau debat, serta kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan tema kebangsaan. Selain itu, siswa juga diperkenalkan pada konteks historis dan filosofi nilai-nilai politik dalam perjalanan bangsa Indonesia agar mereka tidak memandang politik sebagai sesuatu yang rumit atau formal semata, melainkan sebagai pedoman dalam membangun sikap adil, demokratis, dan bertanggung jawab di era modern. Proses pengenalan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran, komitmen, dan rasa memiliki terhadap bangsa sehingga pada akhirnya dapat memperkuat karakter siswa sebagai generasi muda yang cerdas, kritis, dan siap menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa.



Gambar 1. Pengenalan Pendidikan Politik dalam Membentuk *Nation building* bagi Siswa SMA Negeri 7 Gorontalo

Pendidikan politik merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Pada era modern ini, perkembangan informasi yang begitu cepat menuntut siswa, khususnya di tingkat SMA, untuk tidak hanya menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kesadaran politik yang baik. Kesadaran politik sangat penting karena para siswa merupakan calon pemilih pemula yang kelak akan berperan aktif dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui partisipasi politik. Transformasi pendidikan politik di sekolah memiliki makna bahwa proses pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus mampu menghubungkan siswa dengan praktik nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, siswa dapat memahami bahwa politik tidak semata-mata tentang perebutan kekuasaan, melainkan tentang bagaimana menegakkan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi, dan menjaga persatuan bangsa. Bertolak dari pemikiran tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan model kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari pendidikan politik yang dapat menumbuhkan dan memperkuat kecerdasan serta daya kritis para pemilih pemula. Sosialisasi literasi politik bagi siswa SMA menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai sarana pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik. Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan elektoral dan kesadaran politik yang lebih substantif di kalangan pemilih pemula, khususnya siswa SMA.

Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena setiap aspek pendidikan mengandung unsur politik, begitu pula aktivitas politik yang selalu berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan. Hubungan ini penting dalam perkembangan suatu negara karena pendidikan dan politik merupakan dua komponen utama yang memengaruhi sistem sosial dan kebudayaan manusia. Politik berfungsi mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar sejalan dengan cita-cita nasional, sedangkan pendidikan berperan sebagai proses pembudayaan dan pengembangan potensi manusia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dalam kegiatan pengabdian ini, beberapa indikator pendidikan politik dalam membentuk *nation building* mencakup aspek-aspek penting yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat melalui bagan yang menggambarkan hubungan antara nilai-nilai politik dan pembentukan karakter kebangsaan siswa. Transformasi pendidikan politik di SMA Negeri 7 Gorontalo dilakukan dengan menanamkan kesadaran politik sejak dini agar siswa mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Upaya ini mendorong siswa untuk lebih menghargai proses demokrasi, mulai dari musyawarah, pengambilan keputusan, hingga partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran kebangsaan menjadi indikator penting yang membantu siswa memahami perannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap menghormati perbedaan pandangan politik juga ditekankan sebagai bekal untuk menumbuhkan toleransi dan saling menghargai di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Rasa tanggung jawab dipupuk agar siswa mampu menjadi warga negara yang tidak hanya menikmati haknya, tetapi juga menjalankan kewajibannya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepedulian sosial juga menjadi bagian penting dari pendidikan politik, di mana siswa diarahkan untuk peka terhadap permasalahan sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pemahaman ini diperkuat dengan pengembangan identitas kebangsaan agar siswa mampu menempatkan diri sebagai generasi penerus yang berkomitmen membangun bangsa melalui sikap jujur, adil, dan peduli terhadap sesama. Nilai kerja sama dan gotong royong dalam konteks politik juga menjadi perhatian

utama karena keduanya merupakan dasar dari kehidupan berdemokrasi. Selain itu, pendidikan politik di SMA Negeri 7 Gorontalo menekankan pentingnya etika dan moralitas, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep politik secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara beretika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, transformasi pendidikan politik ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kritis, berkarakter, dan siap berperan aktif dalam proses *nation building*. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian dengan tema pendidikan politik ini adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan, serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan sikap antikorupsi serta membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia agar mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain secara bermartabat.

Penguatan Pendidikan Politik dalam Membentuk Nation building di Lingkungan Sekolah pada Siswa SMA Negeri 7 Gorontalo

Ulasan atas pentingnya penguatan pendidikan politik dalam membentuk *nation building* menunjukkan bahwa peran sekolah dalam membentuk kesadaran politik siswa masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan warga negara yang demokratis dan berkarakter kebangsaan. Proses *nation building* perlu diintegrasikan dengan pendidikan kewarganegaraan yang mampu menumbuhkan kesadaran identitas nasional dan refleksi kritis terhadap ideologi dominan dalam masyarakat (Zajda, 2009). Di Indonesia, penguatan pendidikan politik telah diwujudkan melalui inovasi seperti pemilihan langsung ketua OSIS dan kegiatan pembelajaran partisipatif yang menumbuhkan nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial siswa (Santika & Tripayana, 2025). Pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai wahana strategis dalam membangun *nation building* dengan menanamkan nilai keadilan sosial, penghormatan terhadap keberagaman, dan solidaritas kebangsaan (Olayinka & Ridwan, 2024). Selain itu, keberhasilan *nation building* tidak akan tercapai tanpa kontribusi pendidikan politik dan kewarganegaraan sebagai instrumen untuk memperkuat integrasi nasional, kohesi sosial, serta semangat persatuan dalam masyarakat (Falade, 2008). Dari berbagai kajian tersebut dapat konstruksikan bahwa penguatan pendidikan politik di lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk kesadaran kebangsaan dan identitas nasional siswa. Pendidikan politik yang terintegrasi dengan pembelajaran kewarganegaraan mampu menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman. Melalui pendekatan partisipatif, sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan politik, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya *nation building* sebagai fondasi kehidupan berbangsa yang inklusif, kritis, dan berkeadaban.

Berkenaan dengan hal itu, praktik transformasi pendidikan politik di SMA Negeri 7 Gorontalo merupakan aktualisasi dari kesenjangan yang telah dihadirkan. Sehingga, esensi dari penerapan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekolah. Nilai-nilai seperti keterbukaan, saling menghargai, dan partisipasi aktif diterapkan melalui kegiatan pembelajaran maupun aktivitas nonakademik yang mendorong siswa memahami peran mereka sebagai warga negara. Siswa diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut melalui sikap kritis, berani menyampaikan pendapat, peduli terhadap sesama, serta menghargai keberagaman di lingkungannya. Transformasi pendidikan politik diimplementasikan melalui kegiatan rutin maupun insidental, seperti diskusi kelas, simulasi sidang, debat, serta kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan pengalaman langsung dalam praktik berdemokrasi. Guru dan tenaga pendidik berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa memahami isu-isu politik secara objektif, sementara kolaborasi dengan komunitas lokal memberikan wawasan praktis yang lebih dekat dengan realitas kehidupan mereka. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan politik di SMA Negeri 7 Gorontalo tidak hanya menekankan aspek pengetahuan teoritis, tetapi juga diarahkan pada pembentukan karakter siswa yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Melalui praktik nyata tersebut, siswa dipersiapkan untuk menjadi generasi muda yang berperan aktif dalam memperkuat persatuan, mengembangkan demokrasi, serta berkontribusi nyata dalam proses *nation building* di Indonesia. Penguatan ini juga berfokus pada pembentukan karakter siswa secara utuh agar nilai-nilai kebangsaan dapat tertanam kuat dan menjadi bagian integral dari kepribadian mereka.



Gambar 2. Penguatan Pendidikan Politik dalam Membentuk Nation Building

Dalam kegiatan pengabdian ini, terdapat anggota tim yang bertugas memberikan penguatan materi kepada siswa. Pendidikan politik dipahami sebagai proses pembelajaran yang bertujuan menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, serta sikap kritis warga negara dalam memahami kehidupan politik. Bagi generasi muda, khususnya siswa SMA, pendidikan politik bukan hanya tentang mengenal teori atau struktur pemerintahan, melainkan tentang bagaimana mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, menanamkan nilai-nilai demokrasi, serta mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan pendidikan politik menjadi penting karena melalui kegiatan ini generasi muda disiapkan menjadi warga negara yang melek politik dan memiliki literasi politik yang baik. Siswa diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa sekaligus menghindari sikap apatis terhadap politik yang masih sering ditemukan di kalangan pemilih pemula. Tujuan akhirnya adalah membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter.

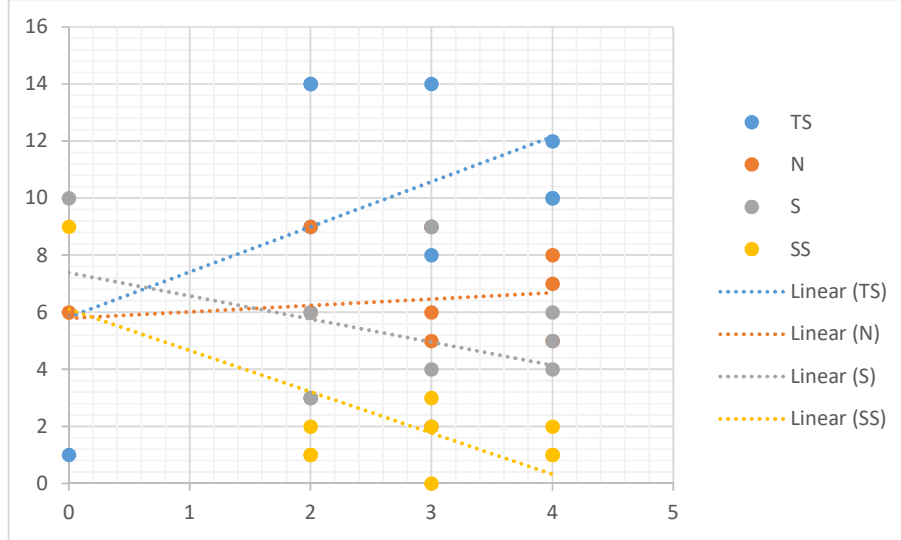
Dalam praktiknya, penguatan pendidikan politik dilakukan melalui berbagai kegiatan. Di ruang kelas, guru mengintegrasikan nilai-nilai politik dalam mata pelajaran seperti PPKn, sejarah, atau sosiologi dengan mengaitkannya pada isu-isu aktual agar siswa mudah memahami konteks nyata. Di luar kelas, kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka, dan organisasi sekolah lainnya menjadi wadah pembelajaran demokrasi secara langsung. Melalui simulasi pemilu, debat, atau sidang sekolah, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengalami praktik demokrasi. Selain itu, forum diskusi, seminar, dan kegiatan literasi politik menjadi media penguatan yang efektif. Siswa diajak berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, serta mampu menganalisis informasi politik yang mereka peroleh dari berbagai sumber, termasuk media massa dan media sosial. Kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah, seperti menghadirkan tokoh masyarakat, akademisi, atau penyelenggara pemilu, juga memperkaya wawasan politik siswa serta menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Nilai-nilai penting yang ditekankan dalam pendidikan politik antara lain demokrasi, tanggung jawab, toleransi, keadilan, serta partisipasi aktif. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membentuk siswa agar tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga siap berperan aktif sebagai warga negara yang baik. Melalui penguatan pendidikan politik, diharapkan siswa tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran politik yang sehat, menjaga persatuan, mendukung pembangunan bangsa, serta menjadi agen perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

Pendidikan politik yang baik dan beretika merupakan prasyarat penting dalam membangun masyarakat demokratis. Tanpa adanya kesadaran dan etika politik, kebebasan demokrasi dapat kehilangan arah dan berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak terkendali. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik di kalangan pelajar menjadi langkah strategis agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan siswa. Sesi ini menjadi sarana refleksi, di mana siswa dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan pertanyaan mereka mengenai penerapan pendidikan politik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog interaktif ini, siswa diajak memahami bahwa politik tidak jauh dari kehidupan mereka, tetapi hadir dalam tindakan sederhana seperti bersikap adil, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di sekolah maupun masyarakat.



Gambar 3. Diskusi dan Evaluasi melalui Pembagian Kuesioner Pendidikan Politik dalam Membentuk Nation building di SMA Negeri 7 Gorontalo.

Gambar 3 memperlihatkan suasana kegiatan diskusi dan evaluasi yang dilakukan di aula SMA Negeri 7 Gorontalo sebagai bagian dari pelaksanaan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian yang terdiri atas dosen dan mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo memfasilitasi sesi tanya jawab serta pembagian kuesioner kepada siswa peserta. Sesi tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan respon siswa terhadap materi pendidikan politik yang telah disampaikan sebelumnya. Terlihat dalam gambar bahwa kegiatan berlangsung secara interaktif; beberapa siswa aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan pemateri di depan ruangan, sementara yang lain mengikuti dengan antusias. Suasana kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan langsung antara pemateri dan peserta, mencerminkan penerapan metode partisipatif dan edukatif dalam proses penguatan literasi politik di lingkungan sekolah. Kegiatan ini juga menandai tahap akhir dari pelaksanaan pengabdian sebelum dilakukan analisis hasil evaluasi terhadap capaian pembelajaran politik siswa. Berdasarkan dua indikator kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 7 Gorontalo, tema pengabdian mengenai pendidikan politik dalam membentuk *nation building* menghasilkan capaian yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini;



Grafik 2. Evaluasi Pemahaman Politik dalam Membentuk Nation building bagi Siswa di SMAN 7 Gorontalo.

Sumber. Olahan data, (2025).

Berdasarkan Grafik 2, terlihat adanya variasi tingkat kesetujuan siswa terhadap setiap pernyataan yang diajukan dalam evaluasi pendidikan politik. Garis tren menunjukkan bahwa kategori “Tidak Setuju (TS)” memiliki nilai yang cenderung meningkat dibanding kategori lain, menandakan bahwa sebagian besar siswa memiliki sikap penolakan terhadap pernyataan-pernyataan yang bersifat pasif atau reduktif terhadap makna pendidikan politik. Sebaliknya, kecenderungan kategori “Netral (N)” dan “Setuju (S)” menunjukkan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan, menandakan adanya kelompok siswa yang masih berada pada posisi tengah dalam memahami hubungan antara pendidikan politik dan pembentukan

karakter kebangsaan. Namun, pada beberapa indikator seperti pemahaman tentang pelajaran PPKn dan kegiatan ekstrakurikuler, nilai “Setuju” meningkat cukup tajam, menunjukkan pengakuan positif terhadap peran kegiatan pendidikan dalam memperkuat semangat kebangsaan. Kategori “Sangat Setuju (SS)” memiliki nilai paling rendah dan cenderung stabil di hampir semua indikator. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun siswa menyetujui pentingnya pendidikan politik, sebagian besar masih berhati-hati dalam memberikan tingkat persetujuan yang tinggi, mungkin karena pengalaman langsung yang masih terbatas dalam penerapan praktik politik di lingkungan sekolah. Secara umum, pola garis linier yang muncul pada grafik ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran kritis siswa terhadap fungsi pendidikan politik, semakin kuat pula penolakan mereka terhadap pandangan sempit tentang politik yang hanya bersifat hafalan, seremonial, atau elitis. Temuan ini mengonfirmasi hasil tabulasi sebelumnya bahwa pendidikan politik di SMAN 7 Gorontalo sudah berfungsi sebagai sarana pembentukan sikap demokratis, berpikir kritis, dan kesadaran kebangsaan yang reflektif.

Data evaluasi sebagaimana tersaji dalam grafik 2, terlihat bahwa pendidikan politik di SMAN 7 Gorontalo telah mulai menunjukkan arah yang konstruktif dalam membentuk kesadaran *nation building* di kalangan siswa, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan. Pada pernyataan pertama, “Pendidikan politik di sekolah cukup diwujudkan melalui hafalan konsep demokrasi, tanpa perlu dikaitkan dengan praktik nyata kehidupan berbangsa”, mayoritas siswa menunjukkan ketidaksetujuan. Dari 24 responden, terdapat 14 siswa memilih tidak setuju, 2 sangat tidak setuju, dan hanya 6 siswa setuju serta 1 siswa sangat setuju. Artinya, sebagian besar siswa memahami bahwa pendidikan politik tidak boleh berhenti pada hafalan konsep, tetapi perlu dihubungkan dengan praktik kehidupan nyata agar memiliki makna substantif. Selanjutnya, pada pernyataan kedua, “Pendidikan politik hanya penting untuk siswa yang bercita-cita menjadi pemimpin, sedangkan siswa lain tidak membutuhkannya”, hasilnya menunjukkan kecenderungan serupa. Sebanyak 12 siswa tidak setuju, 4 sangat tidak setuju, dan hanya 6 siswa setuju serta 1 siswa sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar siswa menilai pendidikan politik penting bagi seluruh warga sekolah tanpa memandang cita-cita kepemimpinan, karena setiap individu memiliki tanggung jawab kebangsaan yang sama. Pada pernyataan ketiga, “Siswa yang mengikuti pelajaran PPKn dengan rajin otomatis sudah memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya membangun persatuan bangsa”, terlihat peningkatan pemahaman positif. Sebanyak 10 siswa setuju dan 9 siswa sangat setuju, sementara hanya 1 siswa tidak setuju dan 6 siswa netral. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelajaran PPKn berperan penting dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesadaran kebangsaan siswa.

Kemudian, pada pernyataan keempat, “Semangat kebangsaan bisa terbentuk secara otomatis hanya dengan kemajuan ekonomi, tanpa perlu pendidikan politik di sekolah”, mayoritas siswa menolak pandangan tersebut. Sebanyak 14 siswa tidak setuju, 3 sangat tidak setuju, dan hanya 4 siswa setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa siswa menyadari bahwa pendidikan politik tetap menjadi pilar penting dalam membangun semangat kebangsaan, terlepas dari faktor ekonomi. Pernyataan kelima, “Perbedaan pendapat di kalangan siswa sebaiknya dihindari karena dapat melemahkan persatuan bangsa”, memperlihatkan adanya pandangan moderat. Dari 24 siswa, 9 memilih tidak setuju, 9 netral, 3 setuju, 2 sangat tidak setuju, dan 1 sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian siswa mulai memahami pentingnya perbedaan pendapat sebagai bagian dari dinamika demokrasi, meskipun sebagian masih menganggap perbedaan dapat menimbulkan perpecahan. Pada pernyataan keenam, “Pendidikan politik yang mengajarkan kritik terhadap kebijakan negara justru bisa melemahkan rasa cinta siswa kepada bangsa”, hasilnya memperlihatkan pandangan yang lebih terbuka. Sebanyak 9 siswa setuju, 6 netral, 8 tidak setuju, 3 sangat tidak setuju, dan 2 sangat setuju. Ini menggambarkan bahwa sebagian siswa sudah memahami bahwa kritik terhadap kebijakan negara bukanlah tanda melemahnya nasionalisme, melainkan bagian dari tanggung jawab warga negara yang kritis dan peduli.

Pernyataan ketujuh, “Semangat kebangsaan akan lebih kuat jika siswa selalu mengikuti pendapat mayoritas, dibandingkan mengembangkan pemikiran kritis sendiri”, menunjukkan pandangan yang cukup beragam. Sebanyak 10 siswa tidak setuju, 4 sangat tidak setuju, 8 netral, 4 setuju, dan 2 sangat setuju. Artinya, mayoritas siswa mulai menghargai pentingnya berpikir kritis dan tidak sekadar mengikuti mayoritas. Selanjutnya, pada pernyataan kedelapan, “Kegiatan ekstrakurikuler kepemimpinan siswa tidak berpengaruh besar dalam membangun semangat kebangsaan, karena persatuan bangsa hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah”, sebagian besar siswa juga tidak

sependapat. Sebanyak 14 siswa tidak setuju, 2 sangat tidak setuju, 6 netral, 3 setuju, dan 2 sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa siswa melihat kegiatan kepemimpinan dan ekstrakurikuler memiliki kontribusi penting dalam membangun semangat kebangsaan di tingkat sekolah. Pernyataan kesembilan, “Pembentukan karakter kebangsaan tidak harus melalui pendidikan politik, karena siswa bisa tetap nasionalis tanpa memahami politik”, juga menunjukkan arah positif. Sebanyak 9 siswa tidak setuju, 3 sangat tidak setuju, 9 netral, 2 setuju, dan 3 sangat setuju. Artinya, sebagian besar siswa memahami bahwa pendidikan politik tetap diperlukan sebagai fondasi dalam pembentukan karakter kebangsaan. Terakhir, pada pernyataan kesepuluh, “Semangat kebangsaan siswa dapat diukur hanya dari keikutsertaan dalam upacara bendera, tanpa perlu melihat sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari”, hasilnya menunjukkan kesadaran yang baik. Sebanyak 10 siswa tidak setuju, 4 sangat tidak setuju, dan hanya 5 siswa setuju serta 1 sangat setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami bahwa nasionalisme tidak cukup diukur dari simbol seremonial, melainkan dari perilaku dan partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat dikonstruksikan bahwa kegiatan pengabdian bertema *Transformasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Nation Building* di SMA Negeri 7 Gorontalo telah berhasil memperkuat indikator kesadaran kritis, partisipasi edukatif, dan internalisasi nilai kebangsaan di kalangan siswa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa mampu memahami pendidikan politik tidak sekadar sebagai hafalan konsep, melainkan sebagai proses reflektif yang berkaitan dengan realitas sosial dan kehidupan berbangsa. Mereka juga menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam membangun tanggung jawab kebangsaan. Selain itu, nilai demokratis dan kemampuan berpikir kritis siswa semakin berkembang melalui penerimaan terhadap perbedaan pendapat serta pemahaman bahwa kritik terhadap kebijakan negara merupakan wujud kecintaan terhadap bangsa. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler turut berperan dalam menumbuhkan semangat kebangsaan yang berakar pada perilaku nyata, bukan hanya simbol seremonial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan politik yang transformatif mampu menumbuhkan generasi muda yang reflektif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan *nation building*.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema Transformasi Pendidikan Politik dalam Membentuk *Nation building* bagi Siswa di SMA Negeri 7 Gorontalo menghasilkan beberapa temuan penting yang menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran politik dan pemahaman kebangsaan di kalangan peserta didik. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa masih memandang pendidikan politik sebagai wacana teoritis yang bersifat hafalan, belum terintegrasi dengan kehidupan nyata, dan belum dimaknai sebagai sarana pembentukan kesadaran kritis serta partisipatif. Melalui serangkaian kegiatan partisipatif seperti diskusi reflektif, simulasi musyawarah, dan debat publik, siswa mulai memahami politik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Hasil evaluasi menunjukkan adanya pergeseran positif dalam cara pandang siswa terhadap peran politik dan tanggung jawab kewarganegaraan. Siswa menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat, memahami pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, serta mulai menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Transformasi ini menegaskan bahwa pendidikan politik yang diterapkan secara kontekstual dan reflektif dapat memperkuat *nation building* di lingkungan sekolah. Selain itu, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan pihak sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang demokratis dan inklusif. Pendekatan partisipatif tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga membangun kesadaran afektif dan perilaku sosial yang mendukung pembentukan karakter kebangsaan. Oleh karena itu, kegiatan ini menyimpulkan bahwa transformasi pendidikan politik harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, agar proses *nation building* tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi terwujud dalam sikap dan tindakan nyata generasi muda. Secara keseluruhan, pengabdian ini berhasil menumbuhkan kesadaran politik yang sehat di kalangan siswa SMA Negeri 7 Gorontalo, memperkuat identitas kebangsaan mereka, serta membekali dengan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi bagi terbentuknya generasi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan berjiwa nasionalis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Transformasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Nation building bagi Siswa di SMA Negeri 7 Gorontalo*” dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada Kepala Sekolah, guru, dan seluruh siswa SMA Negeri 7 Gorontalo atas partisipasi aktif, kerja sama, dan antusiasme mereka selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga ditujukan kepada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, atas dukungan moral, akademik, serta kolaborasi yang memungkinkan kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan. Semoga hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kesadaran politik, membangun karakter kebangsaan, serta menumbuhkan semangat *nation building* di kalangan generasi muda, khususnya peserta didik di tingkat sekolah menengah.

REFERENSI

- Ashworth, P. (2004). Understanding as the transformation of what is already known. *Teaching in Higher Education*, 9(2), 147–158. <https://doi.org/10.1080/1356251042000195310>
- Bendix, R. (2017). *Nation-Building and Citizenship: Studies of Our Changing Social Order*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315125107>
- Bentz, J., O’Brien, K., & Scoville-Simonds, M. (2022). Beyond “blah blah blah”: Exploring the “how” of transformation. *Sustainability Science*, 17(2), 671–686. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-01080-6>
- Connor, W. (1972). Nation-building or nation-destroying? *World Politics*, 24(3), 319–355. <https://doi.org/10.2307/2009724>
- Cumbo, B., & Selwyn, N. (2022). Using participatory design approaches in educational research. *International Journal of Research & Method in Education*, 45(1), 60–72.
- Deutsch, K. W. (2017). Introduction: Nation-Building and National Development—Some Issues for Political Research. Dalam P. Thompson (Ed.), *Nation Building in Comparative Contexts* (hlm. 1–16). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315125046-1>
- Deutsch, K. W., & Foltz, W. J. (2010). *Nation Building in Comparative Contexts*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315125046>
- Falade, D. A. (2008). Civic education as a tool for nation building in Nigeria. *Nigerian Journal of Social Studies*, 11(1), 23–33. Retrieved from <https://sosan.com.ng>
- Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement, and civic education. *Annual Review of Political Science*, 4, 217–234. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217>
- Mylonas, H. (2017). *Nation-Building*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199948772.001.0001>
- Olayinka, S. L., & Ridwan, M. (2024). Citizenship education as a vehicle for nation building: Perspective of Nigeria citizens. *LingLit Journal: Scientific Journal for Linguistics and Literature*, 5(2), 44–55. Retrieved from <https://biarjournal.com>
- Picower, B. (2013). You can’t change what you don’t see: Developing new teachers’ political understanding of education. *Journal of Transformative Education*, 11(3), 238–256. <https://doi.org/10.1177/1541344613481007>
- Santika, I. W. E., & Tripayana, I. N. A. (2025). Strengthening democracy through political education in Indonesia. *International Journal of Education and Research*, 13(1), 12–22. Retrieved from <https://neliti.com>
- Seale, J. (2009). Doing student voice work in higher education: An exploration of the value of participatory methods. *British Educational Research Journal*, 36(6), 995–1015.
- Townley, S. (2005). Perspectives on nation-building. *Yale Journal of International Law*, 30(2), 357–380.
- Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. Dalam *Managing digital transformation* (pp. 13–66). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003018410>

- Wimmer, A. (2015). Nation Building: A Long-Term Perspective and Global Analysis. *European Sociological Review*, 31(3), 401–418. <https://doi.org/10.1093/esr/jcv013>
- Yu, H., & Wang, F. (2025). Understanding the dynamics of ideological and political education: Influences on student political awareness and civic involvement. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-06211-9>
- Zajda, J. (2009). Nation-Building, Identity and Citizenship Education: Introduction. Dalam J. Zajda (Ed.), *Nation-Building, Identity and Citizenship Education* (hlm. 1–11). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9415-1_1